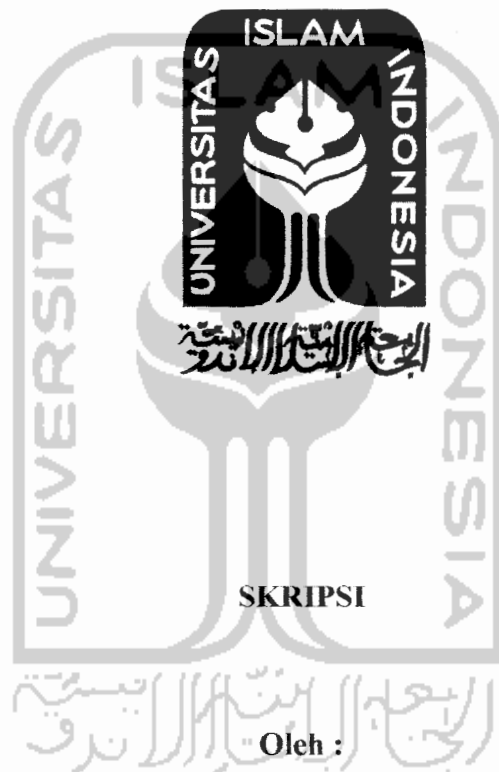


**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**



Nama : Pipit Wulantika

No. Mahasiswa : 02 312 297

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

SKRIPSI

**disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Pipit Wulantika

No. Mahasiswa : 02 312 297

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Maret 2006

Penyusun,

(Pipit Wulantika)

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal Maret 2006

Dosen Pembimbing,

(Drs. Johan Arifin, M.Si)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

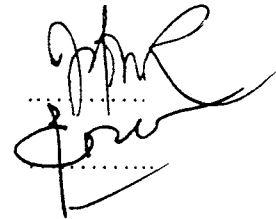
**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN
PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

**Disusun Oleh: PIPIT WULANTIKA
Nomor mahasiswa: 02312297**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 19 April 2006

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Johan Arifin, M.Si

Penguji : Dra. Erna Hidayah, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA



MOTTO

“..... sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

“.....Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antarmu beberapa tingkat lebih tinggi.....”

(Q.S. Al-Mujaadilah : 11)

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.....”

(Q.S. Al-Baqarah : 45)

“Tiada Kemudahan, Selain Dimudahkan Oleh Allah SWT”

(Qoyum Arsyad)

“Tersenyumlah. ... Karena senyum adalah ibadah & alat melupakan kesedihan... ”

(Pipit)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu pula atas keluarga dan Sahabatnya. Hanya karena ridho Allah, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Penulis juga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyadari tanpa adanya bimbingan, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan, pada kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Penolong dalam setiap langkahku.....
2. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. Johan Arifin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih banyak atas bimbingan dan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra Erna Hidayah, M.Si, Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
5. Bapak Arief Rahman, SE, S.Sos, M.Com, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membimbing dan memberikan pengajaran tentang segala hal.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Kedua Orang tuaku tersayang, Mamah dan Papah... terima kasih banyak untuk cinta kasih yang tulus, doa yang tiada henti terucap demi kesuksesan teteh dan segalanya yang telah diberikan pada teteh. Semoga ini bisa menjadi kado terindah buat mamah dan papah.
9. Adikku Umbara De Faiz untuk segala dukungannya.... Teteh yakin, suatu saat nanti dede akan memberikan yang terbaik buat keluarga.
10. Keluarga besar H. Qoyum Arsyad di Serang terimakasih atas doa dan dukungannya. Bapak, inilah hadiah kecil dari cucu bapak yang paling gede..... Om & Tante-tanteku sayang....akhirnya Pipit bisa melewati semuanya.
11. Keluarga Besar H Abdul Djaed di Jakarta. Terbukti kan piet bisa selesain kuliah di Yogya..... Terima kasih atas doa dan perhatiannya selama ini.
12. My best friend di UII, Lia (perpisahan itu memang sakit, walau sesaat tapi pasti terjadi. Tanpamu.... piet ga kan bisa selesai kuliah secepat ini. Thanx yo...), Tria (dd-ku penyelamatku di akhir perjuangan, dah SE duluan ya...),

- Lusy (mudah-mudahan piet ga akan ke dokter lagi ya...Semangat..), Ressa (Narsis abis...), Budi (bang, jadi pilih yang dari mana???), Ida (hadir sebagai teman berbagi di bawah masjid), Erik (Kapan piet dapet pempek lagi ?). Kalian semua kan selalu hadir dalam setiap hidupku..... Persahabatan ini begitu indah. Seindah kisah-kisah kita selama ini.....
13. Mas Viki & yayangnya, sorry waktu kalian berdua dah piet ganggu demi olah data yang rumit. Makasih ya.....
14. Temen-temen kos wartel listy Mb Rom (nasehat & perhatianmu tak kan kulupa....), Mb Lina & Mas Anto (Makasih banget bwt semuanya...kapan kasih ponakan bwt Piet??), Tyas (adekku yang selalu memberiku semangat), d'Anies, d'Ririn & d'Epoy sorry piet selalu ngerepotin semuanya, semoga tali persaudaraan kita akan abadi...
15. Sahabat-sahabatku di Serang.... Nia&Ade, Vina&Lia, Deasy&Isna, Jaka, Devi, Asti, Ninie, Rio, Teguh, Della, temen-temen kelas 2-2 SMUN I Serang, RISMA ALMA Penancangan.... terimakasih atas suportnya selama ini.. Ternyata piet ga jadi ditengok kalian di Yogya.
16. Pak Marthin, Pak Nafis, Teh Yoyoh, M'Kamto yang udah bantu piet nyebar & nyusun kuesioner.
17. Temen-temen di "CK" Reni (Masih minat jadi iparku??), Nanin, Ari, Eno, Eka, Sari gede, Sari kecil, Santi, Ima dll.... Kuberkenalan dengan Yogya bersama kalian.

18. Temen-temen Kost “Loji Sekar”. Mb Yuna, Mb Rina, Iput, Nian, Dhian, Ami, Kiki, Mb Sri, Mb Shinda, Shinta, Mb Rika, Mira, Dina dll. Walau sesaat tapi kuberpisah dengan Yogya bersama kalian.....
19. Teman-teman yang telah banyak memberikan masukan dan saran buat Pipit (Betha, Galuh, Ray, Petty, Elok, Dopin, Ajeng, Ulfa, Ibril dll) makasih...
20. Teman-teman Akuntansi 2002 (Special to kelas D), semoga kita bisa ketemu di tempat yang berbeda.
21. Teman-teman KKN UII SL-39 Hafidzh, Farah, Susan, Ryan, Rudi, Tieta, Anggi, Lukman, Desman & Cicit. kenangan Pundong 3 begitu indah.... Kapan kita kelokasi lagi?.
22. Pihak-pihak yang belum penulis sebutkan yang turut membantu baik dengan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kebaikan dan perhatian yang kalian berikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, Jika terdapat kelebihan dalam skripsi ini, maka semua datangnya dari Allah SWT, dan jika terdapat kekurangan, itu tidak lepas dari penulis sebagai makhluk ciptaan-Nya. Di tengah keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT membimbing dan menyertai setiap langkah kita. Amiin...

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Maret 2006

Penulis,

Pipit Wulantika

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Moto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Keuangan Daerah	10

2.2. Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah	10
2.3. Pengawasan Keuangan Daerah	13
2.4. Pengetahuan Anggaran	15
2.5. Partisipasi Masyarakat	16
2.6. Transparansi Kebijakan Publik	18
2.7. Penelitian Terdahulu.....	19
2.7. Formulasi Hipotesis	20
2.7.1. Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah	20
2.7.2. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah	20
2.7.3. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Sampel	23
3.2. Desain Penelitian	23
3.3. Variabel Penelitian	24
3.4. Metode Analisis.....	25
3.4.1 Teknik Skala Pengukuran.....	25
3.4.2 Uji Validitas dan Realibilitas	25
3.5. Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis	26
3.5.1 Model Penelitian.....	26
3.5.2 Uji Hipotesis.....	28

3.5.3 Uji Asumsi Klasik	28
3.5.3.1 Heteroskedisitas.....	28
3.5.3.2 Autokorelasi	29
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Data Demografi Responden	30
4.2 Statistik Deskriptif.....	32
4.3 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas	33
4.3.1 Hasil Uji Validitas.....	33
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	36
4.4 Analisis Data	37
4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama.....	38
4.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua	42
4.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga	45
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	46
4.5.1 Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.5.2 Uji Autokorelasi.....	48
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	53
5.3 Implikasi Penelitian.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
3.1 Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian	23
3.2 Pengukuran Autokorelasi	29
4.1 Data Demografi Responden	30
4.2 Statistik Deskriptif.....	32
4.3 Hasil Pengujian Validitas	34
4.4 Hasil Pengujian Realibilitas	36
4.5 Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Regresi.....	38
4.6 Hasil Uji Hipotesis Pertama	39
4.7 Hasil Uji Hipotesis Kedua.....	42
4.8 Hasil Uji Hipotesis Ketiga.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Model Penelitian	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
2. Daftar Pertanyaan	57
3. Rekapitulasi Data Hasil Jawabam 52 Responden	64
4. Hasil Perhitungan Regresi	72
5. Hasil Uji Validitas	73
6. Hasil Uji Realibilitas	77



ABSTRAK

Penelitian ini meneliti pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengertian pengawasan keuangan daerah adalah tindakan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Dalam penelitian ini mengambil sampel anggota DPRD Provinsi Banten, dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, kedua interaksi pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, dan ketiga interaksi pengetahuan anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh tidak positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan keadaan yang terjadi di provinsi Banten saat ini.

Kata kunci : Pengawasan keuangan daerah (APBD), pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Dengan dikeluarkannya UU No.22/1999 yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia, maka telah terjadi perubahan signifikan mengenai hubungan legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut memiliki kekuatan yang sama. UU No 22 Tahun 1999 ini tujuan utamanya adalah mendorong terselenggaranya pelayanan publik yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat daerah. Hal-hal yang mendasar sejak dikeluarkannya undang-undang ini adalah semakin kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD yang selanjutnya disebut dewan. Undang-undang ini telah memberikan jalan bagi daerah untuk secara penuh membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, artinya daerah diberi kewenangan secara penuh untuk merencanakan , melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi

kebijakan-kebijakan daerah. Sehingga salah satu implikasi positif dari berlakunya UU tentang otonomi daerah adalah dewan akan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik bersama-sama kepala daerah.

Dampak lain yang muncul dari terlaksananya otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, yang didukung dengan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah.

Pemberian otonomi daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Fenomena yang berkembang saat ini adalah dewan memiliki peran yang kurang baik di mata masyarakat. Saat ini masyarakat kurang mempercayai kemampuan dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penyebabnya adalah kekecewaan masyarakat terhadap kinerja dewan saat ini, baik berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan maupun kecewa atas kinerja dewan karena dewan dianggap sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat dan tidak menyerap aspirasi masyarakat.

Untuk itu agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian wewenangan dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Menurut Mardiasmo (2001) terdapat

tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu : pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD.

Secara umum, lembaga legislatif (DPRD) mempunyai tiga fungsi utama (Sopanah , 2003) , yaitu : fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran oleh dewan harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja, sebagaimana yang selama ini terjadi. Hal ini sangat penting, karena dalam era otonomi, dewan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila tidak dilakukan dengan maksimal, maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan nanti akan mengalami banyak penyimpangan.

Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran atau lebih disebabkan karena permasalahan lain. Disamping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik juga akan berpengaruh terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan.

Salah satu prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah adalah transparansi, dimana pengertian transparansi disini adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-

kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Salah satu perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah dalam upaya pemberdayaan pemerintah adalah Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Selain transparansi, faktor lain yang mempengaruhi dewan dalam pengawasan anggaran adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena semua potensi masyarakat akan tergali dan termanfaatkan. Kata kuncinya memang partisipasi yang nyata dan sehari-hari. Penyertaan masyarakat atau menyertakan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan atau pengelolaan APBD saatnya dilakukan. Cara-cara atau pembahasan yang terbuka di luar DPRD juga saatnya dihidupkan. Dengan demikian perubahan atau pemberlakuan sebuah kebijakan tidak hanya terjadi di kalangan elite saja. Pemerintah saatnya terbuka dan menyertakan seluruh unsur masyarakat. Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dengan baik dan otonomi daerah telah memberikan lingkungan yang mendukung berkembangnya

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Meski belum meluas, telah banyak pelaku-pelaku kebijakan di pemerintahan yang sangat terbuka pada partisipasi masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan selama ini antara lain Sopanah (2002), penelitian yang dilakukan di kabupaten / kota se-Malang Raya ini telah menghasilkan kesimpulan pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) sampelnya adalah anggota DPRD di tingkat Kabupaten / Kota, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengambil sampel anggota DPRD di tingkat Propinsi, yaitu Propinsi Banten.

Beberapa hal yang mendasari penulis mengambil sampel anggota DPRD Propinsi Banten, di antaranya adalah belum ada penelitian sejenis yang mengambil sampel anggota DPRD tingkat Propinsi, selain itu Propinsi Banten sebagai propinsi ke 30 di Indonesia yang baru terbentuk pada tahun 2000 ibarat seorang anak kecil yang masih perlu banyak belajar dan butuh proses untuk membangun masyarakatnya. Salah satu elemen penting dalam proses membangun Banten adalah peran serta DPRD Provinsi Banten yang bersama pemerintah daerah akan menentukan arah pembangunan Banten. Sebagai salah satu elemen penting, maka anggota DPRD propinsi Banten harus banyak belajar dan terus memperbaiki diri supaya dapat mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ?
2. Apakah partisipasi masyarakat akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempengaruhi dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dengan peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Goverment*). Serta diharapkan dapat meningkatkan peran DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran (APBD).

b. Bagi Para Akademisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan manfaat sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya dan diharapkan memberikan manfaat untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di FE UII.

1.4 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu serta formulasi hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya : sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, model penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian berupa keseluruhan atau sebagian, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan harapan umum maupun peneliti. Dalam bab ini juga dipaparkan alasan kesesuaian dan

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004 pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2 Mekanisme Penyusunan Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kewenangan yang selama ini ada di pihak pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah khususnya dalam hal penyusunan

anggaran daerah yang selanjutnya disingkat APBD. Menurut Keputusan MENDAGRI No.29 Tahun 2002 pengertian APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Karena Anggaran merupakan uang milik rakyat yang dititipkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola sebaik mungkin supaya terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik. Apabila dalam penyusunan anggaran tidak dikelola sebaik mungkin, maka akan timbul berbagai bentuk penyelewengan APBD. Oleh karena itu partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menghasilkan APBD yang tidak hanya berpihak pada kepentingan salah satu pihak namun kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sesuai dengan Keputusan MENDAGRI No.29 Tahun 2002, Tahap-tahap penyusunan APBD adalah :

a. Penyusunan arah dan kebijakan Umum APBD

APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran, sehingga dalam menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD terlebih dahulu menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dalam setiap bidang kewenangan pemerintah daerah. Diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman

pada rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh menteri dalam negeri. Penjaringan aspirasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam proses penganggaran daerah. Selain itu juga diperlukan data historis mengenai pencapaian kinerja pelayanan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pertimbangan di masa yang akan datang.

b. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

Perumusan strategi dan prioritas APBD dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum APBD. Perumusan strategi diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan sumber daya (manusia, dana dan atau teknologi) yang tersedia serta kondisi lingkungan. Sedangkan, prioritas merupakan salah satu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain.

Dalam penyusunan strategi dan prioritas APBD, dimulai dengan menyusun strategi dan prioritas APBD oleh pemerintah daerah melalui tim penyusun anggaran eksekutif yang sedapat mungkin menggunakan berbagai sumber data dan metode penyusunan yang memfokuskan pada identifikasi kondisi yang ada, isu strategis, trend ke depan dan analisis SWOT untuk mencapai target yang diharapkan dalam arah dan kebijakan umum APBD. Kemudian strategi dan prioritas APBD yang telah disusun, selanjutnya

disampaikan kepada panitia anggaran legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebelumnya. Arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD selanjutnya menjadi dasar bagi tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan rancangan APBD.

c. **Penyusunan Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran**

Berdasarkan strategi dan prioritas anggaran daerah, Pemda melalui forum warga yang terdiri dari satuan-satuan unit kerja dan warga masyarakat menyusun rencana anggaran daerah.

- d. Kepala daerah menerbitkan surat edaran dan disampaikan kepada setiap unit kerja untuk dasar penyusunan rancangan anggaran unit kerja.
- e. Penyusunan rancangan anggaran unit kerja yang dituangkan dalam pernyataan anggaran, pengajuan pernyataan anggaran kepada tim anggaran eksekutif, evaluasi pernyataan anggaran dan penyusunan rancangan APBD.
- f. Pengajuan rancangan APBD kepada DPRD dan pembahasan rancangan APBD antara tim anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislatif.
- g. Penyampaian rancangan APBD pada sidang paripurna DPRD dan penetapan rancangan APBD menjadi APBD.

2.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 tahun 2001 dalam Sopanah (2003) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Alamsyah (1997) pengawasan APBD adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran

Konsep pengawasan dalam Islam telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat : 8 , yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan”.

Dalam konsep ini dijabarkan betapa pentingnya melakukan saksi kebenaran secara adil, yang berarti betapa pentingnya melakukan suatu pengawasan secara benar untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pengawasan juga perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan asset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*) dan penilaiannya (*valuation*).

Pengertian pengawasan dalam Daeng (2003) merupakan suatu rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjamin agar semua kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta dewan sangatlah penting. Menurut

Sopannah (2003) Pengawasan yang dilakukan dewan dapat berupa pengawasan secara langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan secara langsung dapat dilakukan secara pribadi yaitu dengan meneliti, mengamati, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

2.1 Pengetahuan Anggaran

Posisi DPRD sebagai badan legislatif menuntut pengetahuan dan kemampuan pemahaman tugasnya sebagai wakil rakyat, yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, anggota DPRD harus didukung dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan yang strategis yang berhubungan dengan keberhasilan daerah dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan fungsi-fungsi yang dimilikinya.

Menurut Pamuji dalam Rasyid (2003) kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsi perwakilannya dapat dilihat dari cara pandang anggotanya dalam mengangkat berbagai masalah dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum DPRD. Dengan kata lain, kemampuan anggota DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Dalam proses penyusunan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah khususnya APBD yang tepat dan baik sangat tergantung pada kecakapan dewan untuk menyerap aspirasi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang per undang-undangan. Sehingga dewan akan lebih cepat mengetahui, menyesuaikan diri dan mengambil keputusan tepat dari keadaan yang ada tersebut.

Marbun (1983) menyatakan kemampuan anggota DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam menyerap aspirasi dari masyarakat serta menyalurkannya akan terpenuhi apabila dewan memenuhi persyaratan politik, pendidikan, moral, integritas pengalaman, sehat raga dan mental, serta kemampuan artikulasi yang memadai.

Indriantono dan Supomo dalam Sopanah (2003) menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk bidang tugasnya. Dengan demikian maka pengetahuan akan memberikan dukungan kepada dewan untuk meningkatkan kegiatan pengawasan.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah khususnya pelaksanaan keuangan daerah mempunyai arti penting dan strategis. Menurut Sukria (2005) arti penting tersebut disebabkan oleh beberapa alasan : Pertama, pada kenyataannya partisipasi masyarakat dapat menentukan

keberhasilan atau kegiatan suatu program pembangunan. Kedua, secara konstitusional, partisipasi masyarakat telah diamanatkan oleh GBHN dan bahkan juga di tingkat PBB.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi anggota masyarakat. Menurut Uphoff (1970) dalam Saleh (2004) Partisipasi dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang / material dan informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang sangat penting, menurut Tjokroaminoto (1987) dalam Saleh (2004) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam negara.

Dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata keterlibatan masyarakat dari suatu proses mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi keuangan daerah merupakan pemberdayaan masyarakat yang berarti pula sebagai suatu proses pembangunan masyarakat sebagai upaya dari pemerintah menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya dan daerahnya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya.

2.3 Transparansi Kebijakan Publik

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Norma dan prinsip anggaran dalam penyusunan APBD adalah : transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran.(Surat edaran Mendagri No:903/3172/SJ). Sebagai salah satu norma dan prinsip anggaran, transparansi merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara transparan. Yang berarti bahwa seluruh proses penyusunan anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Sopanah (2003), anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dapat dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis yang telah dilakukan Sopanah (2003) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah yang mengambil sampel penelitian semua anggota dewan se Malang raya yang terdiri dari kota Malang, kabupaten Malang dan kota Batu telah menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Di samping itu interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan.

Beberapa penelitian lain yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi,2001; Syamsiar,2001; 2002; Sutamoto, 2002;) hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh pada kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Sedangkan Andriani (2002)

menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan.

2.5 Formulasi Hipotesis

2.5.1 Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan yang dibutuhkan oleh anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

2.5.2 Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah

Partisipasi merupakan jantung dari demokrasi. Semakin baik kualitas partisipasi, maka demokrasi akan semakin baik pula. Menurut Samuel P Huntington dan Nelson terdapat dua model partisipasi, yaitu partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dikerahkan (*mobilized participation*). Partisipasi yang bersifat otonom jauh lebih baik, karena lahir dari pengorbanan dan kesukarelaan masyarakat untuk terlibat langsung dalam memperjuangkan

hak-hak mereka. Sedangkan partisipasi yang dikerahkan hanya membawa kepentingan segelintir elit politik.

Meskipun DPRD telah dipilih secara sah oleh rakyat, tidak berarti sebagai *power holder*. Mereka tidak boleh langsung mengambil keputusan mendasar jangka panjang begitu saja tanpa berkonsultasi dengan masyarakat. Adalah justru kepentingan para politisi untuk terus mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat dari waktu ke waktu, terutama pada hal-hal yang menyangkut *public policy*.

Ahmadi dkk dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Yaitu pengawasan terhadap pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran akan sangat mempengaruhi peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, jadi partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Partisipasi Masyarakat (X₂) berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (Y).

2.5.3 Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah

Selain adanya partisipasi masyarakat dalam siklus anggaran, salah satu yang diperlukan dalam meningkatkan pengawasan adalah transparansi dimana transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Sopanah (2003) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan, serta interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan, sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

Menurut penulis semakin transparan kebijakan publik yaitu dalam APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat, karena adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik tersebut maka dewan akan semakin meningkatkan kegiatan pengawasan keuangan daerah supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_3 : Transparansi kebijakan publik (X_3) berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Banten yang berjumlah 75 orang. Jumlah kuesioner yang disebarkan sejumlah 75 kuesioner dan tingkat pengembalian sebanyak 64 lembar. Berdasarkan jumlah kuesioner yang kembali terdapat sebanyak 12 kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap, sehingga tidak dapat diolah lebih lanjut. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 kuesioner.

Tabel 3.1

Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Σ Anggota DPRD
Kuesioner yang disebarkan	75
Kuesioner yang kembali	64
Kuesioner yang tidak lengkap	12
Kuesioner yang diolah	52

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah survei, yaitu penelitian yang pengambilan datanya menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 54 pertanyaan-pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban yang tersedia.

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner, diambil dari kuesioner yang ada dalam penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003).

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel penelitian, yaitu :

- a. Variabel independen : pengetahuan anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden mengenai anggaran baik yang berupa RAPBD maupun APBD.

- b. Variabel dependen : Pengawasan keuangan daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan responden (anggota dewan), yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran (APBD)

- c. Variabel moderating : partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Partisipasi Masyarakat adalah sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran. Sedangkan Transparansi Kebijakan Publik adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah di akses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan segala tindakan yang dilakukan pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu.

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Teknik Skala Pengukuran

Teknik skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert, yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju dan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut :

- a. Sangat Setuju (SS) diberi Skor 5
- b. Setuju (S) diberi skor 4
- c. Tidak Tahu (TT) diberi skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner maka kualitas kuesioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pernyataan merupakan hal yang sangat penting. Keabsahan dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh alat ukur variabel yang akan diteliti. Apabila alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data tidak valid, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki tingkat validitas yang tinggi, sebaliknya jika instrumen memiliki tingkat validitas yang rendah maka instrumen dapat dikatakan kurang valid. Pengujian validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun dapat mengukur dengan tepat suatu variabel yang akan diukur.

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas sebaiknya dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang tidak reliabel. Reliabilitas suatu konstruk variabel dapat dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Nugroho,2005).

3.5 Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Model Penelitian

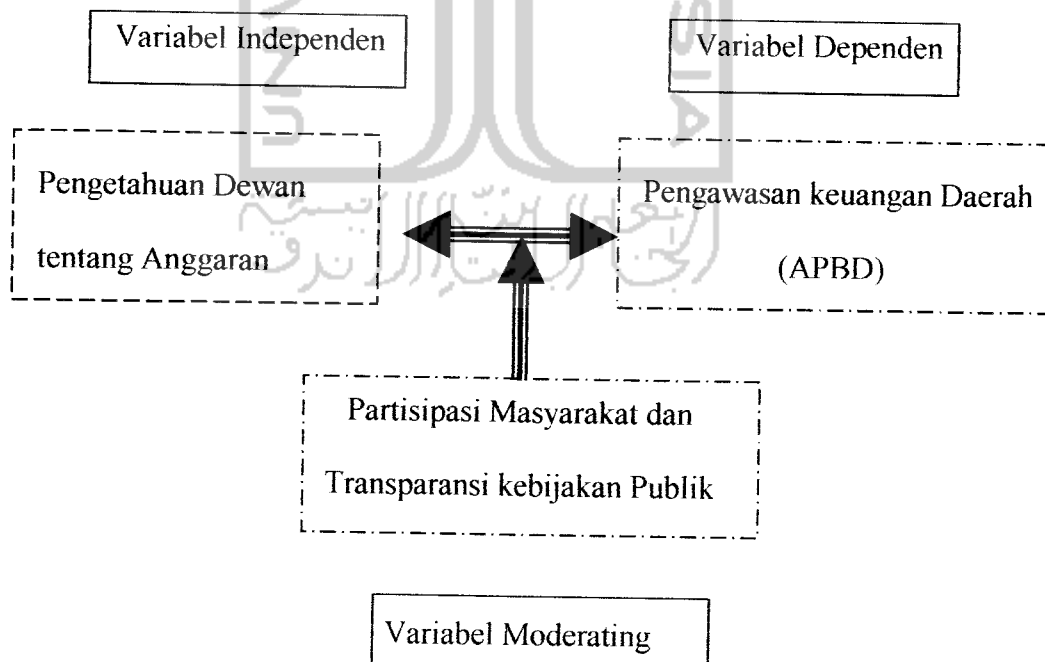
Model statistik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple linier regression*). Model regresi tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y : a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1X_2 + b_5X_1X_3 + e$$

Keterangan :

Y	:	Pengawasan keuangan daerah (APBD)
a	:	Konstanta
b1,b2,b3,b4,b5	:	Koefesien regresi
X1	:	Pengetahuan anggaran
X2	:	Partisipasi Masyarakat
X3	:	Transparansi kebijakan publik
X1,X2	:	Interaksi antara pengetahuan anggaran dan partisipasi masyarakat
X1,X3	:	Interaksi anantara pengetahuan anggaran dan transparansi kebijakan publik.
e	:	Error

Model dalam penelitian ini adalah :



3.5.2 Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan *multiple regression*, yaitu berdasarkan nilai *p-value*, kemudian akan dianalisis koefisien regresi. Keputusan pada ketiga hipotesis diambil jika *p-value* kurang dari taraf signifikansi 0,05 dan koefisien regresi adalah positif maka hipotesis diterima. Apabila *p-value* lebih dari taraf signifikansi 0,05 dan koefisien regresi negatif maka hipotesis ditolak. Untuk menganalisis data, digunakan Program *E-Views*.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linier berganda dalam menganalisis telah memenuhi asumsi klasik. Model regresi linier berganda akan lebih tepat digunakan apabila memenuhi asumsi sebagai berikut :

3.5.3.1 Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2002) dalam Indriani (2006).

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Demografi Responden

Dari 52 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, dapat dilihat ringkasan demografinya pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Data Demografi Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	48	94 %
	Perempuan	4	6%
Usia	30-39 Tahun	9	18 %
	40-49 Tahun	19	37 %
	50-59 Tahun	20	39 %
	> 60 Tahun	4	6 %
Pendidikan	SLTA	16	31 %
	D3	5	10 %
	S1	23	45 %
	S2	8	14 %
Pekerjaan	Wiraswasta	30	58 %
	Swasta	5	10 %
	Pengajar	8	16 %
	PNS	6	9 %
	Bidang Hukum	2	5 %
	Dokter	1	2 %
Jabatan di DPRD	Ketua	1	2 %
	Wakil Ketua	2	3 %

	Anggota	49	95 %
Periode Menjadi Anggota DPRD	1 Periode	39	75 %
	> 1 Periode	13	25 %
Komisi	Komisi A	8	17 %
	Komisi B	9	19 %
	Komisi C	9	19 %
	Komisi D	11	22 %
	Komisi E	12	23 %
Fraksi	Golkar	12	22 %
	PKS	6	12 %
	PDIP	10	18 %
	PPP	4	8 %
	P Demokrat	6	12 %
	PKB	4	8 %
	PBR	4	8 %
	Madani	6	12 %

Sumber : Kuesioner

Jumlah responden pada setiap item adalah 52 responden, kecuali pada item Komisi sebanyak 49 responden. Hal ini dikarenakan 3 responden tidak menduduki jabatan di komisi, namun menduduki jabatan ketua dan wakil ketua.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4.2

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengawasan Y	3,4943	,05657	52
Pengetahuan X1	3,4196	,21529	52
Partisipasi X2	3,4147	,19020	52
Transparansi X3	3,2865	,25974	52
X1X2	11,6917	1,18570	52
X1X3	11,2216	,90216	52

Sumber : Lampiran 3 halaman 72

Dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa pengawasan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,4943 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas jawaban pengawasan rata-rata memberikan penilaian sebesar 3,4943 dan termasuk dalam kondisi pengawasan yang sedang. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,05657 artinya ukuran penyebaran dari variabel pengawasan adalah sebesar 0,05657 dari 52 responden yang diteliti.

Pada variabel pengetahuan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,4196 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas jawaban pengetahuan rata-rata memberikan penilaian sebesar 3,4196 dan termasuk dalam kondisi pengetahuan yang sedang. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,21529 artinya ukuran penyebaran dari variabel pengetahuan adalah sebesar 0,21529 dari 52 responden yang diteliti.

Pada variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai rata-rata sebesar 3,4147 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas jawaban partisipasi masyarakat rata-rata memberikan penilaian sebesar 3,4147

dan termasuk dalam kondisi partisipasi masyarakat yang sedang. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,19020 artinya ukuran penyebaran dari variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,19020 dari 52 responden yang diteliti.

Pada variabel transparansi kebijakan publik memiliki nilai rata-rata sebesar 3,2865 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas jawaban transparansi kebijakan publik rata-rata memberikan penilaian sebesar 3,2865 dan termasuk dalam kondisi pengetahuan yang sedang. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,25974 artinya ukuran penyebaran dari variabel transparansi kebijakan publik adalah sebesar 0,25974 dari 52 responden yang diteliti.

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor setiap pertanyaan dengan skor totalnya. Teknik korelasinya menggunakan *pearson correlation* dengan alat bantu *Software SPSS 11* item pertanyaan diberi predikat valid jika memiliki koefisien korelasi pearson positif dengan signifikansi maksimal 5% (0.05).

Hasil uji validitas pertanyaan tentang variabel pengetahuan anggaran, variabel partisipasi masyarakat, variabel transparansi kebijakan publik, dan variabel pengawasan keuangan daerah dapat diringkas sebagaimana yang tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3

Hasil pengujian Validitas

1. Variabel Pengetahuan Anggaran		
No. Butir	Pearson Correlation	Status
P1	0.551	Valid
P2	0.602	Valid
P3	0.391	Valid
P4	0.382	Valid
P5	0.497	Valid
P6	0.477	Valid
2. Variabel Partisipasi Masyarakat		
No. Butir	Pearson Correlation	Status
P1	0.514	Valid
P2	0.711	Valid
P3	0.373	Valid
P4	0.489	Valid
P5	0.381	Valid
P6	0.431	Valid
P7	0.435	Valid
P8	0.409	Valid
P9	0.462	Valid
P10	0.342	Valid
P11	0.275	Valid
P12	0.518	Valid
P13	0.508	Valid
P14	0.417	Valid
3. Variabel Transparansi Kebijakan Publik		
No. Butir	Pearson Correlation	Status
P1	0.646	Valid
P2	0.386	Valid
P3	0.662	Valid
P4	0.586	Valid
P5	0.413	Valid
P6	0.647	Valid

P7	0.484	Valid
P8	0.409	Valid
P9	0.529	Valid
P10	0.332	Valid
4. Variabel Pengawasan Keuangan daerah		
No. Butir	<i>Pearson Correlation</i>	Status
P1	0.690	Valid
P2	0.358	Valid
P3	0.610	Valid
P4	0.449	Valid
P5	0.390	Valid
P6	0.542	Valid
P7	0.701	Valid
P8	0.371	Valid
P9	0.468	Valid
P10	0.547	Valid
P11	0.380	Valid
P12	0.497	Valid
P13	0.404	Valid
P14	0.519	Valid
P15	0.363	Valid
P16	0.392	Valid
P17	0.474	Valid
P18	0.363	Valid
P19	0.536	Valid
P20	0.349	Valid
P21	0.420	Valid
P22	0.668	Valid
P23	0.437	Valid
P24	0.450	Valid

Sumber : Lampiran 4, halaman 72-76

Berdasarkan hasil pengujian validitas variabel pengetahuan anggaran menunjukkan bahwa ke 6 item dinyatakan valid, validitas variabel partisipasi masyarakat dengan 14 item dinyatakan valid, validitas variabel

transparansi kebijakan publik dengan 10 item dinyatakan valid dan validitas variabel pengawasan dengan 24 item dinyatakan valid. Sehingga semua butir instrumen pertanyaan baik pada variabel pengetahuan anggaran, variabel partisipasi masyarakat, variabel transparansi kebijakan publik, dan variabel pengawasan keuangan daerah yang tertuang dalam angket penelitian dapat dinyatakan valid dan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Program *SPSS for 11.00* memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60 (Nugroho, 2005).

Hasil uji reliabilitas pertanyaan tentang variabel pengetahuan anggaran, variabel partisipasi masyarakat, variabel transparansi kebijakan publik, dan variabel pengawasan keuangan daerah dapat diringkas sebagaimana yang tersaji dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4

Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Koef. Alpha	Nilai α	Status
Pengetahuan Anggaran	0.6681	0,600	Handal

Partisipasi Masyarakat	0,6933	0,600	Handal
Transparansi Kebijakan Publik	0,6701	0,600	Handal
Pengawasan Keuangan daerah	0,8507	0,600	Handal

Sumber : Lampiran 5, halaman 77-81

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach Alpha pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,60. Dengan demikian semua butir pertanyaan dalam variabel penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.4 Analisis Data

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak, maka penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak (*soft ware*) komputer program E-Views. Pengujian dengan regresi berganda dengan model interaksi digunakan untuk menerangkan variabel pengawasan keuangan daerah dari interaksi satu variabel independen dan dua variabel moderating.

Fokusnya adalah pada kesignifikanan dan sifat pengaruh variabel independen dan moderating yang ada dalam persamaan. Jika nilai *p-value* interaksi signifikan pada level 5% (0.05) dan koefisien regresi adalah positif, maka menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini, baik hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga diterima atau berarti interaksi pengetahuan dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Untuk menunjukkan berapa persen pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan interaksinya terhadap pengawasan keuangan daerah digunakan koefisien determinasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Koefisien Determinasi Persamaan Regresi

R Square	Adjusted R Square	F-Statistic	Sig. F
0.982832	0.980966	526,6814	0.000000

Sumber : Lampiran 3, halaman 72

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen, pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan interaksinya berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan melihat nilai koefisien determinasinya sebesar 0.980966, maka dapat diartikan bahwa 98,09% pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh seluruh variabel independen yang diteliti. Sedangkan sisanya 1,91 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah”. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda model interaksi dapat ditunjukkan pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	-0.158958	0.875191	-0.181627	0.8567
Pengetahuan (X1)	0.790691	0.239410	3.302665	0.0019

Sumber : Lampiran 3, Halaman 72

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama dapat dilihat bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.019 dimana nilai signifikansi $0.019 < 0.05$. Artinya bahwa pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.790 artinya adalah semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat dan semakin baik. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima yaitu pengetahuan anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syansiar, 2001; 20002; Sutarnoto, 2002; Andriani, 2002; Sopanah, 2003). Merujuk dari Indriantono dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, dimana dalam hal ini pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk

bidang tugasnya. Dengan demikian pendidikan dan pengalaman akan memberikan dukungan yang lebih kepada dewan untuk dapat meningkatkan kemampuan pengawasan. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki anggota dewan maka diharapkan anggota dewan akan semakin paham akan tugas dan fungsinya saat ini, sehingga peranannya akan senantiasa semakin ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Sopanah (2003), diperoleh kesimpulan bahwa kualitas anggota dewan yang dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada faktor lain yang sangat berpengaruh. Diantaranya adalah faktor politis seperti kepentingan kedudukan dan jabatan serta keuntungan yang dicari bagi perorangan atau kelompok tertentu.

Seperti kita tahu, saat ini jabatan sebagai anggota dewan masih diinginkan bagi sekelompok orang tertentu untuk berbagai macam tujuan tanpa memikirkan kualitas yang dimiliki para anggota dewan tersebut. Salah satu diantara tujuan tersebut adalah keinginan untuk meningkatkan derajatnya dimata masyarakat umum, serta untuk mencari kesenangan pribadi dalam mencari keuntungan semata. Untuk memperoleh tujuan tersebut, sebagian anggota dewan tidak memperhatikan kualitas pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki. Padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota

dewan daerah tersebut, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah yang memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalaman maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga dapat terciptanya keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan.

Dalam proses penyusunan, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah khususnya APBD yang tepat dan baik sangat tergantung pada kecakapan dewan untuk menyerap aspirasi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang per undang-undangan. Sehingga dewan akan lebih cepat mengetahui, menyesuaikan diri dan mengambil keputusan tepat dari keadaan yang ada tersebut.

Melihat kualitas pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan Propinsi Banten saat ini, dapat terlihat bahwa pengalaman dan pendidikan yang dimiliki anggota dewan berpengaruh terhadap pengawasannya. Sebagai Propinsi yang baru berdiri, pengalaman anggota dewan masih sangat minim hal ini dapat dilihat dari hanya 25% anggota dewan yang telah menjabat sebagai anggota dewan lebih dari satu periode, sehingga saat ini kegiatan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal. Namun anggota DPRD Banten telah banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan politik, penyusunan anggaran, otonomi

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua dapat dilihat bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.0118 dimana nilai signifikansi $0.0118 < 0.05$. Sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.194 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan keuangan daerah sangat penting, hal ini bertujuan juga demi terciptanya keberhasilan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil statistik dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sopanah (2003) yang menyimpulkan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan dewan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam Saleh (2004) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam negara.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan kebutuhannya yang terkoordinir dari mulai tingkat desa dilanjutkan tingkat kecamatan lalu kabupaten kemudian kepada dewan tingkat propinsi, selain itu juga dapat direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan fenomena yang terjadi di Propinsi Banten, dimana masyarakatnya turut serta berpartisipasi secara aktif dengan mengadakan dan mengikuti berbagai macam forum komunikasi dengan anggota dewan. Kegiatan ini banyak diselenggarakan oleh kalangan mahasiswa, akademisi maupun masyarakat umum di Banten dengan tujuan supaya tercipta kegiatan pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan pengawasan saja, namun partisipasi masyarakat telah dilakukan sejak dewan melakukan kegiatan penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka dewan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dapat mulai menyerap keinginan masyarakat dan merealisasikannya dalam APBD. Sehingga pada saat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan APBD, masyarakat dapat benar-benar berpartisipasi dan akhirnya tercapailah pengawasan keuangan yang baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah pun tercapai.

Melihat dari hasil penelitian ini dan kenyataan yang terjadi dapat dilihat bahwa memang interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi

masyarakat sangat berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah

4.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Transparansi kebijakan publik (X3) berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan (X1) tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (Y)”. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda model interaksi dapat ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 4.8

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	-0.158958	0.875191	-0.181627	0.8567
Pengetahuan (X1)	0.790691	0.239410	3.302665	0.0019
TRANSPARANSI (X3)	1.813891	0.122979	14.74957	0.0000
X1X3	-0.481999	0.035170	-13.70499	0.0000

Sumber : Lampiran 3, halaman 72

Hasil analisis regresi terhadap hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.000 dimana $0.000 < 0.05$. Sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0.481 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan transparansi kebijakan publik maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin

menurun. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima, namun berlawanan arah.

Hal ini bisa disebabkan karena pengawasan keuangan daerah tidak hanya dilakukan oleh dewan saja, namun juga bersama-sama dilakukan dengan masyarakat. Karena apabila transparansi kebijakan publik semakin baik, maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengawasan keuangan daerah. Sehingga dalam kegiatan pengawasan keuangan daerah, dewan juga dipengaruhi oleh interaksi pengetahuan dan transparansi kebijakan publik.

Sebagai salah satu norma dan prinsip anggaran, transparansi merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus dilakukan secara transparan. Sehingga seluruh proses penyusunan anggaran harus semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sopanah (2003) yang berkesimpulan bahwa interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD. Perbedaan hasil hipotesis ketiga ini bisa disebabkan karena adanya perbedaan sampel yang diambil dalam kedua penelitian ini.

Diterimanya hipotesis ketiga ini dikarenakan transparansi kebijakan publik di Propinsi Banten sudah berjalan semakin baik. DPRD Propinsi

Banten secara perlahan namun pasti telah bersikap transparan kepada masyarakat dalam hal mempublikasikan kebijakan-kebijakan publik yang diambil dengan berbagai cara. Diantaranya melalui surat kabar lokal yang ada di wilayah Banten, radio, maupun dengan komunikasi secara langsung antara dewan dan masyarakat. Selain itu juga kemudahan akses dalam memperoleh informasi tentang anggaran bagi masyarakat yang membutuhkan juga makin menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik telah berjalan dengan baik di Propinsi Banten. Namun dengan semakin baiknya kegiatan transparansi di Banten, anggota DPRD Propinsi Banten tidak berbanding lurus dengan kegiatan pengawasan APBD melainkan berbanding terbalik dengan kenyataan anggota dewan tidak berusaha menaikkan kualitas pengawasan keuangan daerah yang, hal ini dikarenakan Dewan telah merasa dibantu masyarakat. Sehingga semakin transparan kebijakan publik yang dilakukan maka pengawasan keuangan daerah semakin berkurang. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Mardiasmo (2002) bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Seharusnya DPRD tidak menurunkan kualitas pengawasannya apabila kebijakan publik yang dilakukan semakin transparan.

Jadi hasil statistik yang menyimpulkan menolak hipotesis ketiga ini didukung oleh kenyataan yang ada di lapangan dimana transparansi

hasil uji korelasi juga dapat dilihat dari nilai Durbin Watson sebesar 0,237101 maka persamaan regresi tidak mengandung autokorelasi, karena menurut Santoso (2000) angka DW diantara -2 sampai +2 tidak mengandung autokorelasi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan. Hal ini dibuktikan dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.019 dimana nilai signifikansi $0.019 < 0.05$ dan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.790 artinya adalah semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat.

Hasil analisis hipotesis pertama ini membuktikan bahwa pengetahuan anggaran secara positif mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, yang berarti semakin baik pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki anggota DPRD Propinsi Banten maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin baik, karena diharapkan dewan akan semakin paham tugas dan fungsinya saat ini sehingga peranannya akan senantiasa

semakin ditingkatkan. Fakta yang terjadi adalah anggota DPRD Banten semakin berupaya meningkatkan pengetahuan mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar semakin meningkatkan kualitas kerja mereka dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

2. Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0.0118 dimana nilai signifikansi $0.0118 < 0.05$ sedangkan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif 0.194 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meningkat.

Hasil analisis hipotesis kedua ini membuktikan bahwa interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat secara positif mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, yang berarti semakin baik pengetahuan dan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin baik. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat membuat anggota dewan semakin memperbaiki kualitas pengetahuan mereka dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, sehingga tercapainya tujuan pembangunan daerah.

3. Interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan

keuangan daerah (APBD), namun berlawanan arah. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0.000 dimana $0.000 < 0.05$ dan hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif 0.481 artinya adalah semakin tinggi interaksi pengetahuan anggaran yang dimiliki dewan dengan transparansi kebijakan publik maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin menurun. Jadi pengaruhnya tidak positif.

Hasil hipotesis ketiga ini tidak membuktikan bahwa transparansi mempengaruhi pengawasan keuangan daerah namun dengan adanya transparansi, maka kegiatan pengawasan keuangan daerah tidak dilaksanakan semakin baik. Karena dengan semakin baiknya transparansi kebijakan publik di Propinsi Banten tidak berbanding lurus dengan kegiatan pengawasan APBD melainkan berbanding terbalik dengan kenyataan anggota dewan tidak berusaha menaikkan kualitas pengawasan keuangan daerah yang, hal ini dikarenakan Dewan telah merasa dibantu masyarakat sehingga dewan beranggapan pengawasan kini dilaksanakan secara bersama-sama.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis hendak memberikan beberapa saran untuk penelitian yang akan datang agar penelitian selanjutnya lebih sempurna. Saran-saran yang penulis berikan antara lain :

1. Untuk penelitian yang selanjutnya, sebaiknya mengambil sampel anggota dewan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Tidak terbatas hanya pada satu wilayah saja. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas dewan secara keseluruhan.
2. Sampel anggota dewan yang diambil sebaiknya hanya terbatas pada anggota komisi C dan panitia anggaran saja. Karena merupakan bagian yang terlibat secara langsung dalam mekanisme anggaran daerah.

5.3. Implikasi Penelitian

Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat memberikan implikasi baik secara teori maupun praktik, khususnya bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik dalam hal sistem pengendalian manajemen.

Bagi masyarakat diharapkan dalam memilih wakil rakyat nantinya, tidak hanya melihat kepentingan sesaat semata, tetapi juga benar-benar memilih anggota dewan yang berkualitas bagi dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Supaya potensi-potensi daerah yang ada dapat dimanfaatkan secara baik dan benar, elain itu masyarakat juga turut berpartisipasi atas segala kegiatan yang dilakukan anggota dewan, supaya kinerja dewan dapat diawasi.. Sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Wahab, *Memahami Aspirasi Masyarakat Banten*, Suhud Sentrautama, Serang, 2002.
- Alamsyah, *Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman*, Tesis S2 MAP, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997.
- Algifari, *Analisis regresi, Teori, Kasus, dan Solusi*, Edisi Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta, 1997.
- Daeng, Ernawati, *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Sarana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Studi Kasus Pada DPRD Kota Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT*, Tesis S2 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Haryadi, Bambang, *Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi 5, (pp 234-243). Semarang, 2003.
- Indriani, Nurul Tria, *Analisis manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil Yang Mempengaruhi Arus Kas Operasi*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Jurusan Akuntansi FE UII, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII*, 2003.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- _____, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3(2). 2001, Hal 441-456.
- Nugroho, Bhuono Agung, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- Republik Indonesia, *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Keputusan MENDAGRI R.I No.29 Tahun 2002*, Biro Perlengkapan Provinsi Banten, Serang, 2003.

- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbebdaharaan Negara*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- _____, *Undang-undang Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2004
- Saleh, Karim, *Otonomi Desa Globalisasi Ekonomi Memiskinkan rakyat atau Memakmurkan Rakyat*, Hasanudin University Press, Makassar, 2004.
- Santoso, Singgih, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Sekaran, Uma, *Research Methods For Business (A Skill Building Approach)*, John Wiley & sons, Inc, Third Edition, New York, 2000.
- Silalahi. Oberlin, *Studi Tentang Keterwakilan DPRD Sebagai Salah Satu Dimensi Ketahanan Wilayah Propinsi DIY*, Tesis S2 Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Gajah Mada, Yoyakarta, 1995.
- Sopanah, dan Mardiasmo, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Semarang , 2003, Hal 1160-1173.
- Sukria, Entus, *Simpul-simpul Dinamika Strategi Pembangunan Good Governance*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005.
- Sunaryo, Alexius, *Proses Praktik Pembuatan Kebijaksanaan Daerah di Pemda Kotamadya Semarang*, Tesis S2 Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Wedoromo, Wisnu, *Pengenalan Program EvIEWS Sebuah Pengantar Praktikum Inputing Data Statistik Deskriptif dan Pemodelan Dengan Program EvIEWS*, Modul, PPM FE UII, Yogyakarta, 2006.
- Widarjono, Agus, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.

LAMPIRAN 1



Hal : Permohonan Pengisian Kuisioner

Kepada Yth

Bapak / Ibu / Saudara Anggota DPRD Provinsi Banten

Di-

Banten

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang sedang dilakukan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pipit Wulantika
No Mahasiswa : 02 312 297
Fak/ Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

Memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk mengisi kuisioner terlampir.

Kuisioner tersebut akan dipergunakan untuk Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS DI DPRD PROVINSI BANTEN)”**

Atas perhatian dan kesediaan bapak / Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Drs Suwarsono, MA

Dosen Pembimbing

Drs. Johan Arifin, M.Si

Pemohon

Pipit Wulantika

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian.

1. Nama : (Boleh Tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
3. Tempat tanggal lahir : Umur : Tahun
4. Jabatan di DPRD :
 - a. Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua DPRD
 - c. Anggota Komisi Jabatan di Komisi
 - d. Anggota Fraksi Jabatan di Fraksi
5. Berapa Periode Bapak / Ibu / Saudara menjadi anggota DPRD : Tahun
 - a. Periode Tahun sampai dengan selama tahun di DPRD
 - b. Periode Tahun sampai dengan selama tahun di DPRD
 - c. Periode Tahun sampai dengan selama tahun di DPRD
6. Sudah berapa lama Bapak / Ibu / Saudara berdomisili di Provinsi Banten tempat Bapak / Ibu / Saudara menjadi anggota DPRD. Selama Tahun. Dari Tahun sampai dengan
7. Jenjang Pendidikan Terakhir:
 - a. SLTA
 - b. Diploma Satu (D1)
 - c. Diploma Tiga (D3)
 - d. Sarjana Strata Satu (S1)
 - e. Sarjana Strata Dua (S2)
 - f. Sarjana Strata Tiga (S3)
 - g. Lain-lain.....
8. Pelatihan atau Training yang pernah Bapak / Ibu / Saudara ikuti :

No	Keterangan	Tahun	Tempat
1			

2			
3			

9. Pekerjaan terakhir sebelum menjadi anggota DPRD :

10. Pengalaman Organisasi :

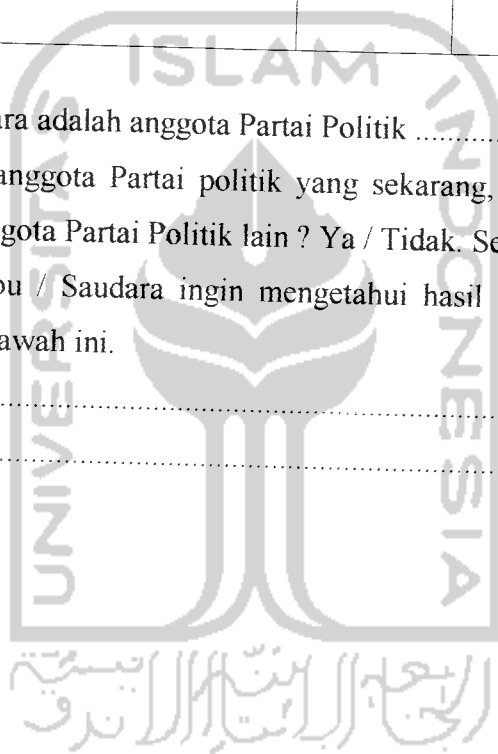
No	Keterangan	Tahun	Tempat
1			
2			
3			

11. Bapak / Ibu / Saudara adalah anggota Partai Politik

12. Sebelum menjadi anggota Partai politik yang sekarang, Bapak / Ibu / Saudara pernah menjadi anggota Partai Politik lain ? Ya / Tidak. Sebutkan

13. Apakah Bapak / Ibu / Saudara ingin mengetahui hasil penelitian ini ? jika Ya, tuliskan alamat di bawah ini.

.....



DAFTAR PERTANYAAN

Pada bagian ini, ingin diketahui seberapa jauh Bapak / Ibu / Saudara menyetujui terhadap masing-masing pernyataan yang diberikan.

Silanglah (x) angka pada kotak yang disamping pertanyaan berikut yang sesuai dengan keadaan di DPRD Propinsi Banten.

- 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = Tidak Setuju 3 = Tidak Tahu
4 = Setuju 5 = Sangat Setuju

I. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

No	Pertanyaan	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Saya mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD	SS	S	TT	TS	STS
2	Jika terjadi pemborosan atau kegagalan didalam pelaksanaan proyek, dewan sulit untuk mengidentifikasi	SS	S	TT	TS	STS
3	Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami	SS	S	TT	TS	STS
4	Dewan tidak tahu bagaimana cara penyusunan APBD yang sebenarnya	SS	S	TT	TS	STS
5	Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya mengetahui	SS	S	TT	TS	STS
6	Praktik pelaksanaan APBD di lapangan ternyata sangat berbeda	SS	S	TT	TS	STS

II. Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Menurut saya, masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan	SS	S	TT	TS	STS

	kebijakan umum APBD					
2	Hilangnya akses bagi masyarakat disebabkan karena dewan telah memanipulasi informasi tentang perubahan kebijakan dan revisi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
3	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD	SS	S	TT	TS	STS
4	Saya kira masyarakat sangat sedikit (bahkan tidak ada) peranannya dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD	SS	S	TT	TS	STS
5	Bagi saya, partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD	SS	S	TT	TS	STS
6	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
7	Sepengetahuan saya, masyarakat selama ini tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD.	SS	S	TT	TS	STS
8	Menurut saya penetapan APBD yang terjadi selama ini lebih berpihak pada kepentingan politik.	SS	S	TT	TS	STS
9	Saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD	SS	S	TT	TS	STS
10	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan masyarakat.	SS	S	TT	TS	STS
11	Saya kira saran dan kritik dari masyarakat dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran.	SS	S	TT	TS	STS
12	Forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media penghakiman terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran.	SS	S	TT	TS	STS
13	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan supaya masyarakat mendapatkan informasi.	SS	S	TT	TS	STS

14	Selama ini antara Dewan dan masyarakat tidak terjadi komunikasi yang strategis.	SS	S	TT	TS	STS
----	---	----	---	----	----	-----

III. Transparansi Kebijakan Publik

No	Pertanyaan	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Menurut saya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi.	SS	S	TT	TS	STS
2	Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.	SS	S	TT	TS	STS
3	Menurut saya selama ini masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran.	SS	S	TT	TS	STS
4	Saya jarang mendapatkan pengumuman kebijakan publik tentang anggaran.	SS	S	TT	TS	STS
5	Sepengetahuan saya, selama ini laporan pertanggung jawaban tahunan selalu tepat waktu.	SS	S	TT	TS	STS
6	Dokumen publik tentang anggaran sulit untuk diakses.	SS	S	TT	TS	STS
7	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara / usulan rakyat.	SS	S	TT	TS	STS
8	Laporan pertanggung jawaban tahunan selama ini menurut saya selalu molor	SS	S	TT	TS	STS
9	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.	SS	S	TT	TS	STS
10	Menurut saya, meskipun suara rakyat diakomodasi, transparansi kebijakan publik tetap dimanipulasi.	SS	S	TT	TS	STS

IV. Pengawasan Keuangan daerah

No	Pertanyaan	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	SS	S	TT	TS	STS
2	Menurut saya, penetapan APBD lebih berpihak kepada kepentingan politik	SS	S	TT	TS	STS
3	Analisis politik saya lakukan dalam rangka menyusun APBD	SS	S	TT	TS	STS
4	Saya tidak terlalu berperan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD	SS	S	TT	TS	STS
5	Bagi saya, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD	SS	S	TT	TS	STS
6	Penyusunan APBD sering mengutamakan politik praktis	SS	S	TT	TS	STS
7	Saya terlibat dalam pengesahan APBD	SS	S	TT	TS	STS
8	Pengesahan APBD belum menunjukkan asas transparansi.	SS	S	TT	TS	STS
9	Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disahkan	SS	S	TT	TS	STS
10	Dalam pengesahan APBD saya tidak terlalu terlibat	SS	S	TT	TS	STS
11	Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi asas transparansi	SS	S	TT	TS	STS
12	Jika masyarakat menanyakan APBD yang telah disahkan, umumnya dewan kesulitan menjawab.	SS	S	TT	TS	STS
13	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD	SS	S	TT	TS	STS
14	Jika terjadi revisi anggaran dalam APBD, saya kira wajar saja.	SS	S	TT	TS	STS
15	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan	SS	S	TT	TS	STS

	triwulanan / bulanan yang dibuat eksekutif					
16	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan saya.	SS	S	TT	TS	STS
17	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
18	Jarang sekali saya mengevaluasi laporan bulanan / triwulanan yang dibuat eksekutif	SS	S	TT	TS	STS
19	Saya meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan gubernur	SS	S	TT	TS	STS
20	Penolakan terhadap LPJ gubernur dilakukan jika terjadi kepentingan konspirasi politik.	SS	S	TT	TS	STS
21	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kegagalan	SS	S	TT	TS	STS
22	Seperlunya saja saya meminta keterangan atas LPJ APBD yang disampaikan Gubernur.	SS	S	TT	TS	STS
23	Jika ada kegagalan dalam LPJ APBD saya kira hanya karena ketidakcermatan dalam menghitung nota anggaran	SS	S	TT	TS	STS
24	Saya aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Gubernur jika tidak sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.	SS	S	TT	TS	STS

LAMPIRAN 2



Rekapitulasi Data Hasil Jawaban 52 Responden
Variabel : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Rata-Rata	Jumlah
1	4	5	4	2	1	5	3,50	21
2	4	5	4	2	1	4	3,33	20
3	5	2	5	1	4	4	3,50	21
4	5	1	4	1	5	5	3,50	21
5	5	2	5	1	4	5	3,67	22
6	4	5	4	2	1	4	3,33	20
7	5	2	5	1	4	4	3,50	21
8	5	2	5	1	5	5	3,83	23
9	5	1	5	2	5	5	3,83	23
10	5	5	5	2	4	4	4,17	25
11	4	5	5	1	5	5	4,17	25
12	5	5	5	2	4	5	4,33	26
13	4	4	5	1	5	5	4,00	24
14	4	2	5	2	5	2	3,33	20
15	5	1	5	1	5	1	3,00	18
16	5	2	5	2	4	1	3,17	19
17	4	1	5	2	5	2	3,17	19
18	5	4	4	2	3	5	3,83	23
19	5	1	5	2	5	2	3,33	20
20	5	2	5	1	5	2	3,33	20
21	4	2	5	2	5	3	3,50	21
22	5	4	4	2	3	4	3,67	22
23	4	2	5	2	4	4	3,50	21
24	5	1	5	2	4	4	3,50	21
25	5	1	4	2	5	5	3,67	22
26	4	2	4	2	5	4	3,50	21
27	4	2	4	2	4	4	3,33	20
28	5	2	5	1	4	5	3,67	22
29	4	2	4	2	4	4	3,33	20
30	5	1	5	1	5	5	3,67	22
31	3	3	3	3	3	3	3,00	18
32	5	1	4	4	4	4	3,67	22
33	4	2	4	2	4	4	3,33	20

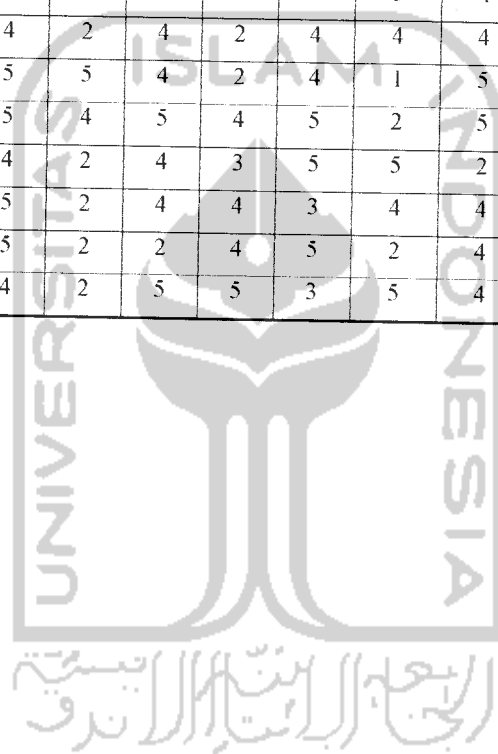
34	5	2	4	2	4	4	3,50	21
35	5	1	4	2	4	5	3,50	21
36	5	1	4	1	5	4	3,33	20
37	2	4	2	4	4	5	3,50	21
38	4	5	4	4	1	5	3,83	23
39	4	4	4	2	2	5	3,50	21
40	4	4	4	2	1	5	3,33	20
41	3	4	4	2	5	4	3,67	22
42	3	3	4	2	4	4	3,33	20
43	4	5	4	2	3	4	3,67	22
44	5	2	5	1	4	4	3,50	21
45	5	2	5	1	5	5	3,83	23
46	2	4	5	2	4	5	3,67	22
47	4	4	5	2	4	5	4,00	24
48	4	5	4	2	3	5	3,83	23
49	4	1	4	4	4	4	3,50	21
50	4	4	4	2	3	5	3,67	22
51	5	5	4	2	4	5	4,17	25
52	4	5	4	2	1	4	3,33	20

Rekapitulasi Data Hasil Jawaban 52 Responden

Variabel : Partisipasi Masyarakat

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	Rata-rata	Jumlah
1	2	1	4	3	4	2	4	5	2	5	3	4	3	3	3,21	45
2	5	1	5	1	5	5	4	2	5	1	5	1	5	2	3,36	47
3	5	1	5	1	5	4	3	2	5	3	4	1	4	2	3,21	45
4	4	1	5	1	5	5	5	2	5	1	5	1	5	2	3,36	47
5	4	4	4	2	3	4	4	4	3	4	4	2	3	4	3,50	49
6	4	1	5	2	5	5	5	5	5	2	4	1	4	2	3,57	50
7	5	1	5	2	4	4	5	4	4	2	4	1	4	1	3,29	46
8	5	2	5	2	5	5	5	5	5	2	4	1	5	2	3,79	53
9	4	2	5	2	5	4	5	4	4	2	5	5	5	1	3,79	53
10	5	2	5	2	5	4	5	4	5	2	5	1	5	2	3,71	52
11	5	2	4	4	2	4	4	2	4	2	4	4	4	4	3,50	49
12	4	2	5	2	4	4	2	2	5	2	5	4	5	4	3,57	50
13	5	1	4	2	5	5	1	2	5	2	5	5	5	5	3,71	52
14	5	2	5	2	5	5	1	1	4	2	5	5	5	5	3,71	52
15	3	2	5	3	4	3	1	1	5	2	4	4	5	4	3,29	46
16	4	2	5	2	5	4	2	1	4	2	4	4	4	4	3,36	47
17	5	1	5	1	4	4	4	4	4	2	5	1	5	2	3,36	47
18	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	3	5	3,57	50
19	5	2	5	4	5	1	5	2	4	2	4	2	3	5	3,50	49
20	2	1	5	2	5	4	2	2	5	1	4	4	4	4	3,21	45
21	4	1	5	4	5	2	5	2	5	2	4	2	4	5	3,57	50
22	2	2	4	2	4	4	2	2	4	2	4	2	4	2	2,86	40
23	5	1	4	4	4	2	4	2	4	2	4	2	3	4	3,21	45
24	4	2	5	5	4	2	5	2	5	2	5	1	4	5	3,64	51
25	2	1	4	2	5	4	4	2	4	1	4	4	4	4	3,21	45
26	5	5	5	2	4	5	5	1	4	1	5	1	4	2	3,50	49
27	5	5	5	3	5	4	5	2	5	1	5	2	5	2	3,86	54
28	4	5	4	2	4	4	5	1	5	4	5	2	5	2	3,71	52
29	5	5	5	2	4	5	5	1	4	1	5	1	4	2	3,50	49
30	5	5	4	2	4	5	5	1	4	1	5	1	4	2	3,43	48
31	5	1	5	1	5	5	5	2	5	2	5	1	4	2	3,43	48
32	5	4	4	2	4	5	5	1	4	1	5	1	4	2	3,36	47
33	4	5	4	2	4	5	5	1	4	1	5	1	5	5	3,64	51
34	3	1	3	2	4	5	4	1	4	1	5	1	3	3	2,86	40
35	5	5	5	1	5	5	5	2	5	1	5	2	5	2	3,79	53

6	4	5	4	1	4	5	2	5	1	4	2	2	5	2	3,29	46
7	4	4	4	2	5	5	5	1	5	1	4	1	5	2	3,43	48
8	4	4	5	2	5	4	5	1	4	1	5	1	5	1	3,36	47
9	5	1	5	2	4	5	1	2	5	1	5	1	5	5	3,36	47
0	2	2	4	4	4	1	5	4	1	1	2	4	5	4	3,07	43
1	1	1	2	4	4	2	4	4	2	4	4	1	2	2	2,64	37
2	4	4	4	2	3	3	3	4	3	4	4	1	3	4	3,29	46
3	4	4	4	2	3	3	4	4	3	4	4	1	3	4	3,36	47
4	1	1	2	4	5	1	4	4	3	4	5	4	2	4	3,14	44
15	2	3	2	4	5	1	4	4	2	5	4	4	4	4	3,43	48
16	2	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	1	4	5	3,29	46
17	5	2	4	2	5	5	4	2	4	1	5	1	5	2	3,36	47
18	5	2	5	2	5	4	5	4	5	2	5	1	5	2	3,71	52
19	2	2	2	4	4	2	4	3	5	5	2	2	2	4	3,07	43
20	2	1	2	4	5	2	4	4	3	4	4	3	1	4	3,07	43
21	2	2	4	4	5	2	2	4	5	2	4	2	3	4	3,21	45
22	1	2	2	4	4	2	5	5	3	5	4	3	2	5	3,36	47



Rekapitulasi Data Hasil Jawaban 52 Responden

Variabel : Transparansi Kebijakan Publik

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Rata-Rata	Jumlah
1	4	2	3	3	4	4	5	2	4	4	3,50	35
2	4	2	4	2	2	2	4	4	4	2	3,00	30
3	5	2	5	2	2	2	2	5	5	1	3,10	31
4	5	3	4	2	2	3	4	5	4	1	3,30	33
5	4	2	4	2	2	2	4	4	4	2	3,00	30
6	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	3,50	35
7	5	2	4	2	2	1	2	5	4	3	3,00	30
8	4	2	4	2	2	2	2	5	5	3	3,10	31
9	5	2	5	2	1	2	1	5	4	2	2,90	29
10	4	2	4	2	4	2	4	4	4	2	3,20	32
11	5	2	4	1	5	2	5	5	4	2	3,50	35
12	5	2	5	2	5	2	5	5	4	2	3,70	37
13	5	1	5	1	4	2	4	4	4	1	3,10	31
14	4	2	4	1	1	2	5	5	4	2	3,00	30
15	5	1	5	2	2	1	4	5	5	1	3,10	31
16	4	2	4	3	1	3	4	5	4	3	3,30	33
17	5	2	4	2	2	2	5	5	5	2	3,40	34
18	5	2	5	2	1	1	4	4	4	4	3,20	32
19	4	2	4	2	2	2	2	5	5	2	3,00	30
20	4	1	1	4	2	5	4	1	5	2	2,90	29
21	4	2	2	5	2	5	5	1	5	4	3,50	35
22	4	1	2	4	2	4	4	1	5	2	2,90	29
23	5	2	5	2	2	2	5	5	5	2	3,50	35
24	4	2	4	2	2	2	2	5	5	2	3,00	30
25	5	2	2	5	2	5	5	2	5	2	3,50	35
26	4	2	4	2	2	2	2	4	4	2	2,80	28
27	4	2	2	4	2	4	4	2	4	2	3,00	30
28	5	2	2	5	2	5	5	1	5	2	3,40	34
29	5	2	4	2	1	2	4	4	4	2	3,00	30
30	5	1	4	2	1	1	5	5	5	2	3,10	31
31	4	2	5	2	2	2	5	5	5	2	3,40	34
32	4	2	4	2	1	2	4	5	5	2	3,10	31

33	4	2	4	2	2	2	5	5	5	2	3,30	33
34	4	1	4	2	2	2	5	5	5	1	3,10	31
35	4	2	4	2	1	2	4	5	5	2	3,10	31
36	5	1	5	2	1	2	4	5	5	2	3,20	32
37	4	2	4	2	1	2	4	5	5	1	3,00	30
38	5	2	4	1	1	1	5	5	5	1	3,00	30
39	5	2	5	1	1	2	4	5	5	2	3,20	32
40	5	2	4	2	1	1	5	5	5	2	3,20	32
41	5	2	5	2	2	2	4	5	4	2	3,30	33
42	4	4	3	2	4	4	4	1	4	2	3,20	32
43	4	5	2	3	4	3	3	4	4	5	3,70	37
44	4	1	3	2	2	3	4	4	3	4	3,00	30
45	4	2	4	2	2	2	4	4	5	2	3,10	31
46	4	2	3	2	3	3	4	4	3	4	3,20	32
47	4	4	4	4	1	2	2	4	4	4	3,30	33
48	4	4	3	2	4	5	2	2	4	3	3,30	33
49	4	4	5	4	4	2	3	3	4	4	3,70	37
50	5	5	3	2	4	5	4	2	4	3	3,70	37
51	4	2	3	2	1	3	4	5	3	4	3,10	31
52	4	2	3	2	1	3	4	4	3	4	3,00	30

Rekapitulasi Data Hasil Jawaban 52 Responden
Variabel : Pengawasan Keuangan Daerah

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	Rata-rata	Jumlah
1	4	2	4	2	4	2	5	2	4	2	4	2	4	4	5	2	3	1	4	1	4	4	2	1	3,00	72
2	5	2	4	2	5	2	4	4	4	2	5	2	5	5	5	1	2	2	5	5	4	5	2	4	3,58	86
3	4	2	5	4	4	1	4	1	5	4	5	2	4	5	4	2	5	2	4	2	4	5	3	4	3,54	85
4	4	2	4	1	5	1	5	2	5	2	4	2	4	4	5	1	3	2	4	5	4	5	2	4	3,33	80
5	4	4	4	2	4	4	2	3	3	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3,46	83
6	5	2	4	2	5	2	5	4	5	2	4	4	4	4	4	1	4	1	4	4	5	5	1	5	3,58	86
7	5	2	4	2	5	2	5	5	5	2	5	2	4	5	5	2	2	1	5	5	5	5	1	5	3,71	89
8	5	2	4	2	5	2	5	5	4	1	5	2	5	5	5	2	3	2	5	4	4	4	1	5	3,63	87
9	5	2	4	2	5	2	2	2	4	4	5	2	4	4	5	2	2	2	5	5	5	5	1	5	3,50	84
10	5	1	5	1	5	2	5	4	4	2	5	2	5	5	5	1	2	2	5	5	4	4	1	4	3,50	84
11	4	4	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	4	2	4	3,25	78
12	5	4	4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	4	5	4	2	4	2	4	2	4	5	1	4	3,42	82
13	5	5	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	4	5	5	2	5	2	5	2	5	5	2	4	3,79	91
14	5	5	4	2	5	2	4	2	5	2	5	2	4	5	4	2	4	2	4	2	4	5	2	4	3,54	85
15	5	5	5	2	4	1	4	2	5	2	5	2	4	4	5	2	5	2	5	2	4	5	1	4	3,54	85
16	5	5	5	2	4	2	4	2	5	2	5	2	4	4	4	2	4	2	4	2	4	5	2	4	3,50	84
17	5	1	5	1	5	1	2	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	2	5	1	5	4	2	5	3,58	86
18	4	3	4	2	4	3	4	4	4	1	4	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	3	2	4	3,33	80
19	4	1	4	2	5	2	5	2	4	2	4	2	5	4	4	2	2	2	5	1	4	4	1	4	3,13	75
20	5	5	5	2	5	2	5	5	5	1	4	2	5	5	5	3	4	1	5	5	5	4	1	4	3,88	93
21	4	2	5	2	5	2	3	5	2	5	5	2	5	5	5	2	5	1	4	5	5	2	2	2	3,54	85
22	4	2	5	2	5	4	5	5	5	1	2	2	4	4	4	4	5	2	5	1	4	2	2	5	3,50	84
23	5	2	5	2	5	5	5	5	5	2	1	1	5	5	5	2	5	1	5	2	5	1	1	4	3,50	84
24	4	2	4	2	5	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	1	5	2	4	2	5	2	2	5	3,58	86
25	5	2	2	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	5	5	2	5	1	5	1	5	1	1	5	3,33	80
26	4	2	5	2	5	2	3	5	2	5	5	2	5	5	5	2	5	2	5	5	5	2	2	2	3,63	87
27	4	2	4	2	4	5	4	4	4	2	1	5	5	5	5	2	5	2	5	2	5	2	2	4	3,54	85
28	4	2	4	2	5	5	4	4	4	2	1	1	5	5	5	2	5	2	5	2	5	2	2	5	3,46	83
29	4	2	4	2	4	2	3	4	2	4	4	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	2	2	2	3,13	75
30	4	2	4	2	4	4	5	4	4	2	2	2	4	4	4	1	4	2	4	2	4	2	2	4	3,17	76
31	5	1	5	1	2	4	5	1	5	5	5	2	5	5	1	5	5	2	5	1	5	5	2	5	3,63	87

32	5	1	5	2	5	2	5	2	5	1	5	1	5	4	5	5	4	2	5	5	5	2	5	5	2	5	3.50	84
33	1	1	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	5	4	4	4	1	5	4	4	1	5	4	1	5	3.29	79
34	5	1	5	1	2	1	5	4	1	4	2	2	4	5	2	5	5	2	5	5	5	1	5	5	2	5	3.42	82
35	5	1	4	1	2	2	5	2	5	5	4	2	5	5	2	5	4	2	5	5	4	2	5	5	1	4	3.42	82
36	4	2	4	2	4	2	5	2	4	2	5	2	5	4	4	5	2	5	2	4	1	5	4	2	5	5	3.38	81
37	5	1	5	1	2	1	5	1	5	5	4	2	4	5	2	4	4	2	5	5	1	5	5	2	5	5	3.38	81
38	4	2	5	1	2	2	5	1	5	5	4	2	4	5	2	4	4	2	4	1	5	5	2	5	5	5	3.38	81
39	4	2	5	2	2	1	5	2	5	5	5	2	5	5	2	4	4	2	5	4	4	2	5	4	2	5	3.58	86
40	4	2	5	2	5	2	5	2	5	5	4	2	5	4	2	5	5	2	4	2	4	2	4	4	2	4	3.54	85
41	5	1	5	1	2	1	5	1	5	5	5	2	5	5	2	4	5	2	5	1	4	5	2	5	2	5	3.46	83
42	4	2	4	4	1	2	5	2	5	5	5	2	5	4	2	5	5	2	5	2	5	5	2	5	2	5	3.67	88
43	5	4	5	2	4	2	5	4	5	2	5	2	5	5	5	5	2	4	2	4	4	5	2	5	2	5	3.88	93
44	5	4	4	2	4	5	4	4	2	5	2	1	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3.42	82
45	2	4	4	5	4	4	4	2	5	2	4	4	5	4	2	2	2	2	4	4	2	4	4	5	4	4	3.58	86
46	4	4	4	2	4	5	4	2	3	4	4	2	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3.46	83
47	4	5	4	2	4	4	4	3	3	4	4	2	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3.58	86
48	5	5	4	2	1	4	4	4	2	4	1	4	5	4	4	5	2	4	4	3	4	2	3	4	4	4	3.50	84
49	4	4	4	2	1	3	4	3	2	4	3	4	2	4	4	5	5	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3.42	82
50	4	2	5	2	5	2	5	5	4	2	5	2	5	5	2	2	2	1	5	4	4	5	2	5	2	5	3.54	85
51	4	4	4	2	2	4	4	5	2	4	2	4	2	4	4	2	2	4	5	3	4	2	3	5	3	5	3.46	83
52	4	4	4	2	2	4	4	5	2	4	2	4	2	4	4	2	2	4	5	3	4	2	3	5	3	5	3.46	83

LAMPIRAN 3



HASIL PERHITUNGAN REGRESI

Dependent Variable: PENGAWASAN_Y01

Method: Least Squares

Date: 03/08/06 Time: 08:39

Sample: 1 52

Included observations: 52

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.158958	0.875191	-0.181627	0.8567
PARTISIPASI_X201	-0.548226	0.266703	-2.055563	0.0455
PENGETAHUAN_X101	0.790691	0.239410	3.302665	0.0019
TRANSPARANSI_X301	1.813891	0.122979	14.74957	0.0000
X1X2	0.194046	0.073951	2.623981	0.0118
X1X3	-0.481999	0.035170	-13.70499	0.0000
R-squared	0.982832	Mean dependent var		3.494269
Adjusted R-squared	0.980966	S.D. dependent var		0.056569
S.E. of regression	0.007804	Akaike info criterion		-6.760084
Sum squared resid	0.002802	Schwarz criterion		-6.534941
Log likelihood	181.7622	F-statistic		526.6814
Durbin-Watson stat	0.237101	Prob(F-statistic)		0.000000

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengawasan Y	3,4943	,05657	52
Pengetahuan X1	3,4196	,21529	52
Partisipasi X2	3,4147	,19020	52
Transparansi X3	3,2865	,25974	52
X1X2	11,6917	1,18570	52
X1X3	11,2216	,90216	52

LAMPIRAN 4



HASIL PENGUJIAN VALIDITAS PENGETAHUAN

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	JUMLAH
P1	Pearson Correlation	1	,157	,039	-,142	,649**	-,103	,551**
	Sig. (2-tailed)		,266	,782	,315	,000	,469	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
P2	Pearson Correlation	,157	1	-,186	,137	,145	,354*	,602**
	Sig. (2-tailed)	,266		,186	,331	,303	,010	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
P3	Pearson Correlation	,039	-,186	1	,180	-,078	,211	,391**
	Sig. (2-tailed)	,782	,186		,201	,582	,133	,004
	N	52	52	52	52	52	52	52
P4	Pearson Correlation	-,142	,137	,180	1	-,108	,111	,382**
	Sig. (2-tailed)	,315	,331	,201		,447	,434	,005
	N	52	52	52	52	52	52	52
P5	Pearson Correlation	,649**	,145	-,078	-,108	1	-,143	,497**
	Sig. (2-tailed)	,000	,303	,582	,447		,311	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
P6	Pearson Correlation	-,103	,354*	,211	,111	-,143	1	,477**
	Sig. (2-tailed)	,469	,010	,133	,434	,311		,000
	N	52	52	52	52	52	52	52
JUMLAH	Pearson Correlation	,551**	,602**	,391**	,382**	,497**	,477**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,005	,000	,000	
	N	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS PARTISIPASI MASYARAKAT

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	JUMLAH
P1	Pearson Correlation	1	,474**	,564**	-,223	,103	,622**	,318*	-,156	,404**	-,153	,438**	-,071	,523**	-,109	,514**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,111	,466	,000	,022	,269	,003	,278	,001	,616	,000	,443	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P2	Pearson Correlation	,474**	1	,343*	,177	,198	,392**	,352*	-,018	,495**	-,021	,385**	,180	,402**	,282*	,711**
	Sig. (2-tailed)	,000		,013	,209	,159	,004	,010	,900	,000	,880	,005	,203	,003	,043	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P3	Pearson Correlation	,564**	,343*	1	-,212	-,033	,459**	,254	-,162	,347*	-,286*	,219	-,071	,604**	-,107	,373**
	Sig. (2-tailed)	,000	,013		,131	,816	,001	,069	,250	,012	,040	,119	,616	,000	,450	,007
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P4	Pearson Correlation	-,223	,177	-,212	1	,202	-,129	-,052	,580**	-,090	,565**	-,236	,342*	,038	,463**	,489**
	Sig. (2-tailed)	,111	,209	,131		,151	,362	,713	,000	,525	,000	,092	,013	,788	,001	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P5	Pearson Correlation	,103	,198	-,033	,202	1	-,046	,188	,132	,233	,031	-,007	,169	,102	,213	,381**
	Sig. (2-tailed)	,466	,159	,816	,151		,744	,182	,351	,096	,830	,958	,232	,472	,130	,005
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P6	Pearson Correlation	,622**	,392**	,459**	-,129	-,046	1	,547**	-,240	,327*	-,345*	,377**	,005	,571**	-,311*	,431**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,001	,362	,744		,000	,086	,018	,012	,006	,972	,000	,025	,001
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P7	Pearson Correlation	,318*	,352*	,254	-,052	,188	,547**	1	-,010	,254	-,016	,127	,072	,212	-,171	,435**
	Sig. (2-tailed)	,022	,010	,069	,713	,182	,000		,947	,069	,909	,370	,613	,131	,226	,001
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P8	Pearson Correlation	-,156	-,018	-,162	,580**	,132	-,240	-,010	1	-,303*	,709**	-,365**	,457**	-,167	,365**	,409**
	Sig. (2-tailed)	,269	,900	,250	,000	,351	,086	,947		,029	,000	,008	,001	,237	,008	,003
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P9	Pearson Correlation	,404**	,495**	,347*	-,090	,233	,327*	,254	-,303*	1	-,245	,539**	,032	,336*	,170	,462**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,012	,525	,096	,018	,069	,029		,080	,000	,824	,015	,230	,001
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P10	Pearson Correlation	-,153	-,021	-,286*	,565**	,031	-,345*	-,016	,709**	-,245	1	-,292*	,373**	-,312*	,349*	,342*
	Sig. (2-tailed)	,278	,880	,040	,000	,830	,012	,909	,000	,080		,035	,006	,024	,011	,013
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P11	Pearson Correlation	,438**	,385**	,219	-,236	-,007	,377**	,127	-,365**	,539**	-,292*	1	-,054	,319*	-,047	,275*
	Sig. (2-tailed)	,001	,005	,119	,092	,958	,006	,370	,008	,000	,035		,705	,021	,738	,048
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P12	Pearson Correlation	-,071	,180	-,071	,342*	,169	,005	,072	,457**	,032	,373**	-,054	1	,150	,255	,518**
	Sig. (2-tailed)	,616	,203	,616	,013	,232	,972	,613	,001	,824	,006	,705		,287	,068	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P13	Pearson Correlation	,523**	,402**	,604**	,038	,102	,571**	,212	-,167	,336*	-,312*	,319*	,150	1	-,085	,508**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,000	,788	,472	,000	,131	,237	,015	,024	,021	,287		,551	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P14	Pearson Correlation	-,109	,282*	-,107	,463**	,213	-,311*	-,171	,365**	,170	,349*	-,047	,255	-,085	1	,417**
	Sig. (2-tailed)	,443	,043	,450	,001	,130	,025	,226	,008	,230	,011	,738	,068	,551		,002
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
JUMLAH	Pearson Correlation	,514**	,711**	,373**	,489**	,381**	,431**	,435**	,409**	,462**	,342*	,275*	,518**	,508**	,417**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,007	,000	,005	,001	,001	,003	,001	,013	,048	,000	,000	,002	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	JUMLAH
P1	Pearson Correlation	1	-,023	,486**	,193	-,075	,261	,674**	,488**	,552**	-,053	,646**
	Sig. (2-tailed)		,871	,000	,171	,596	,062	,000	,000	,000	,709	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P2	Pearson Correlation	-,023	1	,091	,403**	,176	,250	-,172	-,307*	,103	,280*	,386**
	Sig. (2-tailed)	,871		,519	,003	,213	,074	,223	,027	,466	,044	,005
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P3	Pearson Correlation	,486**	,091	1	,427**	,116	,281*	,323*	,248	,439**	,079	,662**
	Sig. (2-tailed)	,000	,519		,002	,411	,044	,020	,077	,001	,579	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P4	Pearson Correlation	,193	,403**	,427**	1	,203	,513**	,118	-,203	-,001	,232	,586**
	Sig. (2-tailed)	,171	,003	,002		,148	,000	,405	,148	,994	,097	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P5	Pearson Correlation	-,075	,176	,116	,203	1	,435**	-,061	-,023	,021	,174	,413**
	Sig. (2-tailed)	,596	,213	,411	,148		,001	,670	,873	,885	,218	,002
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P6	Pearson Correlation	,261	,250	,281*	,513**	,435**	1	,195	,023	-,074	,250	,647**
	Sig. (2-tailed)	,062	,074	,044	,000	,001		,165	,873	,604	,074	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P7	Pearson Correlation	,674**	-,172	,323*	,118	-,061	,195	1	,417**	,385**	-,168	,484**
	Sig. (2-tailed)	,000	,223	,020	,405	,670	,165		,002	,005	,235	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P8	Pearson Correlation	,488**	-,307*	,248	-,203	-,023	,023	,417**	1	,575**	-,057	,409**
	Sig. (2-tailed)	,000	,027	,077	,148	,873	,873	,002		,000	,689	,003
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P9	Pearson Correlation	,552**	,103	,439**	-,001	,021	-,074	,385**	,575**	1	-,158	,529**
	Sig. (2-tailed)	,000	,466	,001	,994	,885	,604	,005	,000		,262	,000
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
P10	Pearson Correlation	-,053	,280*	,079	,232	,174	,250	-,168	-,057	-,158	1	,332*
	Sig. (2-tailed)	,709	,044	,579	,097	,218	,074	,235	,689	,262		,016
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
JUMLAH	Pearson Correlation	,646**	,386**	,662**	,586**	,413**	,647**	,484**	,409**	,529**	,332*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,005	,000	,000	,002	,000	,000	,003	,000	,016	
	N	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS PENGAWASAN

		Correlations																									
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	JUMLAH	
P1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	1	.061 52	.641** 52	.024 52	.540** 52	.065 52	.549** 52	.051 52	.492** 52	.068 52	.335** 52	.066 52	.313** 52	.167 52	.317** 52	.109 52	.571** 52	.237 52	.364** 52	.180 52	.410** 52	.662** 52	.314** 52	.421** 52	.690** 52	
P2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.061 52	1	-.073 52	.405** 52	-.106 52	.677** 52	.008 52	.328** 52	-.245 52	.685** 52	-.441** 52	.435** 52	.360** 52	.464** 52	.077 52	.278** 52	.104 52	.313** 52	-.151 52	.270 52	-.213 52	-.049 52	.414** 52	-.335** 52	.358** 52	
P3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.641** 52	-.073 52	1	-.020 52	.687** 52	.156 52	.609** 52	.054 52	.164 52	.158 52	.380** 52	.195 52	.282** 52	.234 52	.162 52	.250 52	.227 52	.079 52	.288** 52	.062 52	.189 52	.535** 52	.089 52	.458** 52	.810** 52	
P4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.024 52	.405** 52	-.020 52	1	-.129 52	.235 52	.451** 52	.054 52	.203 52	.238 52	.085 52	.294** 52	.274** 52	.186 52	.133 52	.368** 52	.068 52	.073 52	.280** 52	.146 52	.179 52	.267 52	.328** 52	-.036 52	.449** 52	
P5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.540** 52	-.106 52	.687** 52	-.129 52	1	.033 52	.361** 52	-.027 52	.345** 52	.001 52	.364** 52	-.132 52	.265 52	.087 52	.133 52	-.006 52	.273 52	-.240 52	.069 52	-.112 52	.163 52	.500** 52	-.084 52	.223 52	.390** 52	
P6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.065 52	.677** 52	.156 52	.235 52	.033 52	1	.056 52	.687** 52	-.170 52	.989** 52	-.234 52	.668** 52	.194 52	.888** 52	.056 52	.356** 52	-.118 52	.330** 52	.007 52	.290** 52	.136 52	.019 52	.283** 52	-.080 52	.542** 52	
P7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.549** 52	.008 52	.609** 52	.451** 52	.361** 52	.056 52	1	-.059 52	.514** 52	.057 52	.410** 52	.087 52	.310** 52	.243 52	.273** 52	.202 52	.263 52	.208 52	.510** 52	.196 52	.366** 52	.626** 52	.177 52	.537** 52	.701** 52	
P8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.051 52	.328** 52	.054 52	.054 52	.027 52	.687** 52	-.059 52	1	.049 52	.708** 52	.148 52	.569** 52	.012 52	.512** 52	.059 52	.151 52	.060 52	.138 52	.000 52	.164 52	.008 52	.000 52	.210 52	.000 52	.000 52	
P9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.492** 52	-.245 52	.164 52	.203 52	.345** 52	-.170 52	.514** 52	-.049 52	1	-.183 52	.595** 52	-.104 52	.064 52	-.014 52	.344** 52	-.130 52	.632** 52	-.097 52	.484** 52	.037 52	.562** 52	.555** 52	.046 52	.368** 52	.468** 52	
P10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.066 52	.665** 52	.156 52	.238 52	.001 52	.989** 52	.057 52	.708** 52	-.183 52	1	-.249 52	.701** 52	.196 52	.696** 52	.056 52	.396** 52	-.095 52	.333** 52	.033 52	.281** 52	-.127 52	.018 52	.300** 52	-.061 52	.547** 52	
P11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.335** 52	-.441** 52	.380** 52	.085 52	.364** 52	-.234 52	.410** 52	-.148 52	.595** 52	-.249 52	1	-.122 52	-.109 52	-.199 52	.406** 52	-.094 52	.587** 52	-.146 52	.438** 52	.023 52	.330** 52	.611** 52	.125 52	.499** 52	.380** 52	
P12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.068 52	.435** 52	.196 52	.294** 52	-.132 52	.688** 52	.087 52	.569** 52	-.104 52	.701** 52	-.122 52	1	.129 52	.401** 52	.140 52	.488** 52	.098 52	.296** 52	.148 52	-.014 52	.109 52	.039 52	.194 52	-.018 52	.497** 52	
P13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.314** 52	.360** 52	.282** 52	.274** 52	.265 52	.194 52	.310** 52	-.012 52	.064 52	.196 52	-.109 52	.129 52	1	.215 52	.136 52	.098 52	.013 52	.040 52	.043 52	.152 52	.171 52	.249 52	.268 52	.055 52	.404** 52	
P14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.167 52	.464** 52	.234 52	.166 52	.067 52	.688** 52	.243 52	.512** 52	-.014 52	.696** 52	-.199 52	.401** 52	.215 52	1	.263 52	.473** 52	.147 52	.330** 52	.155 52	.388** 52	-.186 52	.107 52	.190 52	.065 52	.519** 52	
P15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.317** 52	.077 52	.162 52	.133 52	.133 52	.056 52	.273** 52	.092 52	.344** 52	.056 52	.406** 52	.140 52	-.136 52	-.263 52	1	.000 52	.435** 52	.151 52	.218 52	.000 52	.278** 52	.245 52	.050 52	.171 52	.363** 52	
P16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.109 52	.278** 52	.250 52	.368** 52	-.006 52	.356** 52	.202 52	.262 52	-.130 52	.396** 52	-.084 52	.489** 52	.098 52	.473** 52	.000 52	1	.059 52	.110 52	.060 52	-.033 52	.082 52	.155 52	-.043 52	-.022 52	.392** 52	
P17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.571** 52	.204 52	.227 52	.068 52	.273 52	.118 52	.283 52	.073 52	.632** 52	-.095 52	.587** 52	.098 52	.013 52	.147 52	.435** 52	.059 52	1	.127 52	.385** 52	-.051 52	.524** 52	.571** 52	.150 52	.301** 52	.474** 52	
P18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.237 52	.313** 52	.079 52	.073 52	.240 52	.330** 52	.208 52	.102 52	-.097 52	.333** 52	-.146 52	.298 52	.040 52	.330** 52	.151 52	.110 52	.127 52	1	.167 52	.445** 52	-.030 52	.027 52	.360** 52	.154 52	.363** 52	
P19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.364** 52	-.151 52	.286** 52	.280** 52	.069 52	.007 52	.510** 52	.087 52	.484** 52	-.033 52	.438** 52	.148 52	.043 52	.155 52	.218 52	.060 52	.385** 52	.167 52	1	.067 52	.568** 52	.498** 52	.113 52	.502** 52	.538** 52	
P20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.186 52	.270 52	.062 52	.146 52	-.112 52	.290** 52	.196 52	.175 52	.037 52	.281** 52	.023 52	-.014 52	.152 52	.388** 52	.000 52	-.033 52	-.051 52	.445** 52	.067 52	1	-.066 52	.041 52	.399** 52	.161 52	.349** 52	
P21	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.410** 52	-.213 52	.189 52	.179 52	.163 52	-.136 52	.368** 52	.005 52	.562** 52	-.137 52	.330** 52	.109 52	.171 52	-.188 52	.278** 52	.028 52	.524** 52	-.030 52	.568** 52	-.066 52	1	.514** 52	-.058 52	.407** 52	.420** 52	
P22	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.662** 52	-.049 52	.535** 52	.267 52	.500 52	.019 52	.628** 52	-.127 52	.555** 52	.019 52	.811** 52	.039 52	.249 52	.107 52	.245 52	.155 52	.571** 52	.027 52	.458** 52	.041 52	.514** 52	1	.176 52	.374** 52	.668** 52	
P23	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.314** 52	.414** 52	.089 52	.328** 52	-.084 52	.283** 52	.177 52	.071 52	.046 52	.300** 52	.125 52	.194 52	.268 52	.190 52	.050 52	-.043 52	.150 52	.360** 52	.113 52	.399** 52	-.058 52	.176 52	1	.169 52	.437** 52	
P24	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.421** 52	-.335** 52	.458** 52	-.038 52	.223 52	-.080 52	.537** 52	.035 52	.366** 52	-.081 52	.499** 52	.018 52	.055 52	-.005 52	.171 52	-.022 52	.361** 52	.154 52	.502** 52	.161 52	.407** 52	.374** 52	.189 52	1	.450** 52	
JUMLAH	Pearson Correlation Sig. (2-tailed): N	.690** 52	.358** 52	.610** 52	.449** 52	.380** 52	.542** 52	.701** 52	.371** 52	.468** 52	.547** 52	.380** 52	.497** 52	.404** 52	.519** 52	.363** 52	.392** 52	.474** 52	.363** 52	.536** 52	.349** 52	.420** 52	.666** 52	.437** 52	.450** 52	1	

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5



HASIL PENGUJIAN REALIBILITAS PENGETAHUAN

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,0000				
P2	,1573	1,0000			
P3	,0394	-,1864	1,0000		
P4	-,1419	,1374	,1804	1,0000	
P5	,6488	,1455	-,0781	-,1077	1,0000
P6	-,1027	,3538	,2109	,1108	-,1432
JUMLAH	,5508	,6020	,3906	,3816	,4967

	P6	JUMLAH
P6	1,0000	
JUMLAH	,4769	1,0000

N of Cases = 52,0

Reliability Coefficients 7 items

Alpha = ,6681 Standardized item alpha = ,6310

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS PARTISIPASI MASYARAKAT

Reliability

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,0000				
P2	,4738	1,0000			
P3	,5641	,3431	1,0000		
P4	-,2234	,1771	-,2121	1,0000	
P5	,1033	,1984	-,0331	,2018	1,0000
P6	,6225	,3924	,4592	-,1289	-,0464
P7	,3177	,3522	,2542	-,0522	,1879
P8	-,1563	-,0179	-,1623	,5796	,1320
P9	,4044	,4949	,3466	-,0901	,2331
P10	-,1531	-,0214	-,2862	,5654	,0306
P11	,4384	,3845	,2188	-,2361	-,0075
P12	-,0712	,1796	-,0713	,3422	,1686
P13	,5234	,4018	,6042	,0381	,1019
P14	-,1087	,2816	-,1072	,4629	,2126
	P6	P7	P8	P9	P10
P6	1,0000				
P7	,5475	1,0000			
P8	-,2404	-,0095	1,0000		
P9	,3272	,2544	-,3028	1,0000	
P10	-,3454	-,0163	,7092	-,2452	1,0000
P11	,3765	,1270	-,3650	,5394	-,2923
P12	,0051	,0717	,4568	,0316	,3733
P13	,5713	,2120	-,1669	,3360	-,3117
P14	-,3108	-,1707	,3647	,1695	,3493
	P11	P12	P13	P14	
P11	1,0000				
P12	-,0537	1,0000			
P13	,3189	,1504	1,0000		
P14	-,0475	,2552	-,0845	1,0000	

N of Cases = 52,0

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients 14 items

Alpha = ,6933 Standardized item alpha = ,7036

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,0000				
P2	-,0230	1,0000			
P3	,4864	,0914	1,0000		
P4	,1927	,4028	,4265	1,0000	
P5	-,0753	,1755	,1164	,2035	1,0000
P6	,2610	,2501	,2808	,5128	,4354
P7	,6740	-,1720	,3229	,1180	-,0606
P8	,4881	-,3071	,2476	-,2032	-,0227
P9	,5521	,1033	,4386	-,0011	,0205
P10	-,0531	,2802	,0787	,2325	,1738

	P6	P7	P8	P9	P10
P6	1,0000				
P7	,1954	1,0000			
P8	,0226	,4170	1,0000		
P9	-,0735	,3850	,5749	1,0000	
P10	,2498	-,1677	-,0568	-,1583	1,0000

N of Cases = 52,0

Reliability Coefficients 10 items

Alpha = ,6701 Standardized item alpha = ,6849

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS PENGAWASAN

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Correlation Matrix

	P1	P2	P3	P4	P5
P1	1,0000				
P2	,0611	1,0000			
P3	,6407	-,0730	1,0000		
P4	,0237	,4053	-,0204	1,0000	
P5	,5399	-,1059	,6870	-,1292	1,0000
P6	,0654	,6769	,1561	,2355	,0331
P7	,5491	,0082	,6091	,4509	,3615
P8	-,0507	,3278	,0537	,0540	-,0273
P9	,4924	-,2450	,1641	,2033	,3452
P10	,0662	,6847	,1579	,2382	,0008
P11	,3345	-,4415	,3797	,0851	,3640
P12	,0658	,4347	,1951	,2936	-,1324
P13	,3145	,3602	,2816	,2737	,2654
P14	,1673	,4643	,2344	,1857	,0873
P15	,3175	,0769	,1619	,1326	,1332
P16	,1086	,2781	,2496	,3679	-,0061
P17	,5709	-,2038	,2273	,0675	,2730
P18	,2374	,3131	,0787	,0727	-,2404
P19	,3636	-,1514	,2876	,2801	,0694
P20	,1882	,2703	,0623	,1460	-,1117
P21	,4105	-,2126	,1894	,1792	,1632
P22	,6619	-,0487	,5352	,2673	,4999
P23	,3136	,4139	,0887	,3281	-,0836
P24	,4212	-,3349	,4579	-,0379	,2234

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Correlation Matrix

	P6	P7	P8	P9	P10
P6	1,0000				
P7	,0561	1,0000			
P8	,6875	-,0592	1,0000		
P9	-,1696	,5137	-,0487	1,0000	
P10	,9887	,0568	,7061	-,1832	1,0000
P11	-,2341	,4096	-,1481	,5955	-,2491
P12	,6679	,0865	,5694	-,1037	,7010
P13	,1936	,3103	-,0124	,0641	,1958
P14	,6879	,2435	,5121	-,0142	,6958
P15	,0558	,2735	,0919	,3443	,0564
P16	,3559	,2021	,2624	-,1299	,3958
P17	-,1177	,2631	-,0734	,6323	-,0953
P18	,3296	,2084	,1019	-,0970	,3333
P19	-,0073	,5101	,0972	,4843	-,0329

P20	,2904	,1959	,1753	,0371	,2810
P21	-,1356	,3662	,0049	,5625	-,1372
P22	,0189	,6277	-,1268	,5552	,0191
P23	,2832	,1767	,0708	,0456	,3000
P24	-,0797	,5369	-,0350	,3665	-,0807

	P11	P12	P13	P14	P15
P11	1,0000				
P12	-,1225	1,0000			
P13	-,1093	,1292	1,0000		
P14	-,1992	,4008	,2151	1,0000	
P15	,4065	,1402	-,1362	-,2633	1,0000
P16	-,0941	,4881	,0975	,4729	,0000
P17	,5866	,0983	,0130	-,1465	,4349
P18	-,1460	,2977	,0403	,3299	,1506
P19	,4381	,1479	,0433	,1547	,2182
P20	,0232	-,0142	,1518	,3885	,0000
P21	,3297	,1090	,1705	-,1876	,2784
P22	,6107	,0391	,2490	,1071	,2454
P23	,1245	,1945	,2675	,1904	,0497
P24	,4994	-,0178	,0545	-,0053	,1709

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Correlation Matrix

	P16	P17	P18	P19	P20
P16	1,0000				
P17	,0585	1,0000			
P18	,1103	,1269	1,0000		
P19	,0599	,3848	,1665	1,0000	
P20	-,0327	-,0512	,4454	,0670	1,0000
P21	,0278	,5236	-,0300	,5681	-,0655
P22	,1551	,5712	,0267	,4978	,0414
P23	-,0431	,1499	,3600	,1128	,3992
P24	-,0223	,3012	,1543	,5021	,1613

	P21	P22	P23	P24
P21	1,0000			
P22	,5139	1,0000		
P23	-,0576	,1759	1,0000	
P24	,4069	,3742	,1893	1,0000

N of Cases = 52,0

Reliability Coefficients 24 items

Alpha = ,8507 Standardized item alpha = ,8504